

DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA FISKAL DAERAH DAN KETAHANAN PANGAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Wiwiek Rindayati^{*)}, M Parulian Hutagaol^{*)}, Hermanto Siregar^{*)}

^{*)} Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB

ABSTRACT

The implementation of fiscal decentralization in accordance with Law No 32/2004 regarding local government and No. 33/2004 regarding inter-government fiscal relationship was considered as the new era management and local government budgets. The objectives of this study are (1) to analyze factors affecting regional fiscal performance, regional economy performance, poverty and food security performance, (2) to evaluate impact of fiscal decentralization policy on poverty and food security in West Java. The descriptive analysis and simultaneous econometrical models were used in this study, using pooled time series data of 1995-2005 and cross section data of 13 kabupaten estimated using the 2SLS method. The result of the study shows that the DAU was the source of 68 persen of regional income. The routine expenditures were the largest regional expenditures (77 persen). The policy of increasing wages of agricultural has affectively increased food security and poverty alleviation in West Java.

Keywords : *Fiscal decentralization, fiscal performance, economics growth, poverty allevation, food security.*

PENDAHULUAN

Permasalahan dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan adalah terkait adanya fakta bahwa kemiskinan di Indonesia sebagian besar berada di perdesaan sektor pertanian khususnya pada subsektor tanaman pangan (Susenas, 2002; Yudhoyono, 2004; Herliana, 2004). Demi keberlangsungan pembangunan dan terwujudnya ketahanan pangan berkelanjutan pemerintah harus punya keberpihakan sehingga dalam membangun ketahanan pangan harus diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petani pangan sebagai pelaku produksi bahan pangan. Peningkatan pendapatan bagi petani pangan merupakan insentif yang bisa merangsang untuk meningkatkan produksi pangan, apabila petani pangan tidak terinsentif untuk memproduksi bahan pangan maka dikhawatirkan dalam jangka panjang akan mengancam keberlangsungan ketahanan pangan karena terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Sebagai negara agraris prestasi pembangunan tidak cukup hanya dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kemandirian dalam memenuhi pangan bagi penduduknya dan peningkatan kesejahteraan

petani merupakan faktor penting dalam upaya tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah daerah bersama masyarakat. Peran pemerintah daerah bersama masyarakat diharapkan lebih besar karena pemerintah daerah dianggap lebih tahu dalam mengatasi permasalahan secara lebih spesifik berdasarkan pada potensi dan keunggulan serta keaneka-ragaman sumberdaya. Kondisi ini memungkinkan berkembangnya kreativitas masyarakat daerah dalam mengembangkan potensi pangan sesuai dengan sumber daya, budaya dan selera masyarakat setempat.

Desentralisasi fiskal memberi peluang pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah untuk meningkatkan penerimaannya, dari sisi pengeluaran dengan kendala anggaran lebih mampu membelanjakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memberi eksternalitas pada kegiatan ekonomi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat sehingga bisa mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan penduduk sesuai dengan tujuan dan semangat dari desentralisasi fiskal yaitu terciptanya demokratisasi, keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sondakh, 1999 dan Stiglitz, 2000).

Alasan yang mendasari pemikiran bahwa pengelolaan keuangan negara secara terdesentralisasi lebih baik dibanding dengan pengelolaan secara sentralistik adalah karena akan terjadi efisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Desentralisasi membuat pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi dan preferensi kebutuhan masyarakat dibanding dengan pemerintah yang terpusat (Pogue and Sqontz, 1976; Lin and Liu, 2000; Roy Bahl, 1999; Rao, 2000; Smoke, 2001; Kerk and Garry, 1997). Hipotesis serupa juga disampaikan oleh Tiebout yang dikenal dengan Tiebout Hypotesis yaitu untuk barang-barang publik yang memungkinkan perbedaan permintaan antar daerah maka efisiensi alokasi sumber daya akan lebih baik jika produksi barang tersebut dilakukan secara desentralistik (Stiglitz, 2000).

Pola bantuan atau sistem transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan inti dari kebijakan desentralisasi fiskal karena pengeluaran pemerintah daerah sebagian besar yaitu sekitar dua per tiganya berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat. Sebelum masa desentralisasi fiskal program bantuan dari pemerintah pusat sebagian besar dilakukan dalam bentuk *specific grant*, dimana penentuan alokasi anggaran sudah ditentukan dari pemerintah pusat dengan format yang sangat rigid sehingga seringkali implementasi di lapang banyak terkendala pada urusan administratif. Dengan desentralisasi pola penyaluran bantuan pemerintah pusat berubah menjadi bentuk *block grant*, sehingga perencanaan program, implementasi serta monitoring dan evaluasi dilakukan pada pemerintah daerah. Bentuk *block grant* dalam kerangka desentralisasi fiskal berupa Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam implementasi desentralisasi fiskal diperlukan pembiayaan yang sangat besar di daerah karena banyaknya kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pegawai pusat yang didaerahkan sehingga hampir 80 persen sumber pembiayaan pemerintah daerah digunakan untuk kegiatan operasional/pengeluaran rutin, dengan demikian sumber pembiayaan untuk

dana pembangunan menjadi sangat terbatas. Dalam keterbatasan anggaran pembangunan peran pemerintah harus semakin dikurangi dan dioptimalkan sementara partisipasi masyarakat harus semakin ditingkatkan. Peran pemerintah harus benar-benar memberi eksternalitas pada berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Studi ini akan mengkaji berbagai alternatif kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan dalam konsteks implementasi desentralisasi fiskal. Tujuan penelitian : (1) menganalisis kinerja fiskal daerah sebelum dan masa desentralisasi fiskal; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja fiskal daerah (penerimaan dan pengeluaran daerah), ketahanan pangan dan kemiskinan daerah; (3) menganalisis dampak penerapan berbagai skenario kebijakan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan; (4) merumuskan implikasi kebijakan strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan dalam konteks implementasi desentralisasi fiskal di Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab tujuan penelitian digunakan analisis diskriptif dan model ekonometrika sistem persamaan simultan dinamis yang terdiri 4 blok yaitu blok fiskal daerah, PDRB, kemiskinan dan ketahanan pangan. Model yang dibangun disusun dalam 19 persamaan struktural dan 9 persamaan identitas. Analisis simulasi historis dilakukan pada periode desentralisasi fiskal (tahun 2001-2005) dengan berbagai skenario kebijakan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan.

Penelitian dilakukan di Jawa Barat dengan unit analisis daerah kabupaten berbasis pertanian. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa *pooled data time series* tahun 1995-2005 dan *cross section* 13 kabupaten dari BPS Pusat Jakarta, BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Kabupaten, Departemen Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jabar, Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Keuangan, Pemda Kabupaten dan instansi terkait. Model diestimasi dengan metoda Two Stage Least Squares (2SLS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Fiskal Daerah di Jawa Barat

Desentralisasi fiskal membawa perubahan struktur penerimaan dan struktur pengeluaran pemerintah daerah sebagaimana tersaji pada Tabel 1. Penerimaan daerah mengalami peningkatan secara signifikan, jika sebelum desentralisasi secara riil sebesar 3,45 trilyun rupiah maka meningkat menjadi 17,72 trilyun rupiah. Peningkatan terjadi pada semua komponen baik PAD, bagi hasil maupun dana alokasi dari pusat. Nilai kenaikan pajak dan retribusi daerah secara relatif semakin menurun hal ini karena adanya peningkatan penerimaan dari pos DAU yang kontribusinya relatif besar. Sehingga walaupun secara absolut PAD meningkat tetapi share terhadap penerimaan daerah menurun dari 20 persen menjadi 10 persen. Komponen bagi hasil pajak dan sumber daya alam juga meningkat, namun secara relatif share terhadap penerimaan daerah menurun dari 15 persen menjadi 13 persen.

Komponen dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana Subsidi Daerah Otonom (SDO) masa sebelum

desentralisasi fiskal dan Dana Alokasi Umum (DAU) masa desentralisasi fiskal mengalami peningkatan sangat besar, bahkan merupakan komponen yang peningkatannya paling besar, yaitu 2 trilyun atau sebesar 58,17 persen sebelum desentralisasi dan meningkat menjadi 11,98 trilyun atau 67,65 persen. Tingginya dana tranfer dari pemerintah pusat karena besarnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk membiayai pembelanjaan pemerintah daerah. Kondisi ini mencerminkan tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang meningkat. Desentralisasi fiskal diharapkan membawa perubahan pada peningkatan kemandirian daerah yang tercermin pada kontribusi PAD, namun pada saat ini masih belum bisa terealisasi karena peranan daerah belum optimal dalam menggali sumber-sumber PAD baru terutama dari sumber peningkatan laba usaha daerah (BUMD) yang relatif masih sangat kecil. Efisiensi dan efektivitas dalam penggalan pajak dan retribusi daerah masih perlu ditingkatkan kinerjanya agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang bisa menghambat masuknya investasi ke daerah namun harus bisa menyentuh semua wajib pajak yang ada di daerah/potensi pajak yang ada.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 1995 -2005, Tahun dasar 1993 (Milyar rupiah)

Uraian	Sebelum Desentralisasi Fiskal (1995-2000)		Masa Desentralisasi Fiskal (2001-2005)	
Pendapatan Asli Daerah	648,03	(20,23)	1.791,28	(10,11)
Pajak Daerah	240,30	(06,96)	734,80	(04,15)
Retribusi Daerah	336,64	(09,76)	739,26	(04,17)
Laba BUMD	13,24	(00,38)	37,30	(00,20)
PAD Lainnya	107,85	(03,13)	279,94	(01,58)
Dana Perimbangan	2.558,46	(74,14)	14.297,24	(80,67)
Bagi Hasil	551,34	(15,97)	2.314,16	(13,06)
Bagi Hasil Pajak	476,42	(13,81)	1.944,28	(10,97)
Bagi Hasil SDA	74,92	(02,17)	369,88	(02,09)
DAU & DAK	2.007,12	(58,17)	11.983,08	(67,61)
Pinjaman Daerah	19,90	(00,60)	78,04	(00,40)
Sisa Anggaran	129,37	(03,75)	774,68	(04,37)
Pendapatan Lain	44,86	(01,30)	781,50	(00,44)
Total Pendapatan Daerah	3.450,62	(100,0)	17.722,70	(100,0)
Pengeluaran Rutin	2.500,73	(64,37)	13.355,76	(76,87)
Pengeluaran Pembangunan	1.384,00	(35,62)	4.018,36	(23,13)
Sektor Pertanian & Irigasi	69,35	(01,79)	287,68	(01,66)
Sektor Pertanian	44,21	(01,27)	126,26	(00,73)
Sektor Irigasi	25,14	(00,65)	161,44	(00,93)
Sektor Industri	6,64	(00,17)	18,72	(00,11)
Sektor Infrastruktur	731,90	(18,84)	1.579,86	(09,09)
Sektor Pelayanan Umum	341,04	(08,78)	1.393,00	(08,02)
Sektor Lainnya	235,06	(06,05)	739,08	(04,25)
Total Pengeluaran Daerah	3.884,73	(100,0)	17.374,12	(100,0)

Sumber : Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota berbagai tahun terbitan

Desentralisasi fiskal membawa perubahan pada pengeluaran daerah, pengeluaran sebelum desentralisasi sebesar 3,8 trilyun meningkat menjadi 17,3 trilyun rupiah. Komponen pengeluaran mengalami peningkatan pada semua sektor, paling besar komponen pengeluaran rutin yaitu sebelum desentralisasi fiskal 2,5 trilyun atau sebesar 64,37 persen menjadi 13,3 trilyun atau sebesar 76,87 persen. Tingginya pengeluaran rutin pada masa desentralisasi fiskal karena terjadinya peningkatan jumlah pegawai pusat yang didaerahkan pada masa desentralisasi dan adanya peningkatan pengeluaran sehubungan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah. Kapasitas fiskal daerah adalah sumber penerimaan daerah dari PAD dan dana transfer bagi hasil dari pusat berupa bagi hasil pajak dan SDA, kapasitas fiskal mengalami penurunan dari 36 persen masa sebelum desentralisasi fiskal menjadi 23 persen pada masa desentralisasi fiskal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Fiskal, Perekonomian Daerah, Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Jawa Barat

Hasil pendugaan model secara umum cukup representatif menjelaskan perilaku peubah-peubah endogen, nilai koefisien determinasi relatif tinggi berkisar antara 0,524-0,976. Berdasarkan uji Durbin ada 2 persamaan mengalami serial korelasi. Sebagian besar peubah penjelas dalam setiap persamaan struktural berpengaruh terhadap peubah endogen pada taraf nyata sampai dengan 20 persen. Hasil pendugaan parameter model dan elastisitas secara rinci terlampir pada Lampiran 1.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah terdiri dari PAD, dana bagi hasil, dana alokasi dan dana lainnya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan dana lainnya. Faktor yang signifikan berpengaruh positif terhadap pajak daerah adalah PDRB, jumlah penduduk tidak miskin, dummy desentralisasi fiskal dan lag pajak daerah, sedang jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap pajak daerah. Dummy desentralisasi fiskal bernilai positif menunjukkan pajak daerah setelah desentralisasi fiskal bernilai lebih besar, dengan desentralisasi fiskal daerah lebih bisa menggali potensi penerimaan daerah melalui ekstensifikasi

dan intensifikasi pajak daerah (Sondakh, 1999). Dana alokasi signifikan dipengaruhi positif oleh jumlah penduduk, luas daerah, jumlah penduduk miskin dan dummy desentralisasi fiskal. Dummy desentralisasi fiskal bernilai positif menunjukkan masa desentralisasi fiskal terjadi kenaikan dana transfer dari pemerintah pusat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, pengeluaran pembangunan terdiri dari pengeluaran pembangunan sektor pertanian dan pengeluaran sektor lain. Pengeluaran rutin secara signifikan dipengaruhi jumlah pegawai, belanja barang, dana alokasi, dummy desentralisasi fiskal, dan lag pengeluaran rutin. Dummy desentralisasi fiskal bernilai positif berarti nilai pengeluaran rutin masa desentralisasi fiskal relatif lebih besar. Pengeluaran sektor pertanian secara signifikan dipengaruhi positif oleh areal tanaman padi, PAD, dana alokasi, dummy desentralisasi fiskal dan lag pengeluaran sektor pertanian.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten di Jawa Barat

PDRB dibedakan antara PDRB sektor pertanian dan PDRB Non pertanian. PDRB pertanian dipengaruhi positif oleh tenaga kerja sektor pertanian, pengeluaran pembangunan sektor pertanian, pendapatan sektor pertanian, dan lag pembangunan sektor pertanian. PDRB non pertanian dipengaruhi positif oleh tenaga kerja sektor non pertanian, pengeluaran pembangunan sektor lain dan pendapatan non pertanian.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Gabah

Faktor yang signifikan mempengaruhi produksi gabah adalah harga gabah, jumlah penggunaan pupuk, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, dummy desentralisasi fiskal dan produksi gabah tahun sebelumnya. Dana pengeluaran sektor pertanian tidak signifikan mempengaruhi produksi gabah, produksi gabah lebih dominan dipengaruhi secara langsung penggunaan input pupuk dan tenaga kerja. Dummy desentralisasi fiskal signifikan bernilai positif terhadap produksi gabah, hal ini menunjukkan bahwa pada masa desentralisasi fiskal produksi gabah relatif lebih besar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Sektor Pertanian

Pendapatan sektor pertanian signifikan dipengaruhi positif oleh produksi gabah, tenaga kerja sektor pertanian, lag pendapatan sektor pertanian. Pengeluaran pembangunan sektor lain berpengaruh negatif terhadap pendapatan sektor pertanian. Sebagai daerah sentra produksi beras, pendapatan sektor pertanian dipengaruhi produksi gabah karena usahatani padi merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk di daerah penelitian. Nilai elastisitas 0,2515 hal ini sesuai dengan kondisi petani daerah penelitian produksi padi bukan merupakan sumber pendapatan satu-satunya bagi petani, tetapi ada sumber pendapatan lain dari subsektor lain pada sektor pertanian maupun dari sektor di luar pertanian. Jumlah keterlibatan penduduk pada sektor pertanian sebagai tenaga kerja akan mempengaruhi pendapatannya, karena pada sektor pertanian khususnya padi sebagian besar pemilik juga ikut terlibat sebagai tenaga kerja. Pengeluaran pembangunan sektor lain merupakan kompetitor dalam pendanaan dengan sektor pertanian, sehingga apabila dana pembangunan banyak dikeluarkan pada sektor di luar pertanian terutama sektor yang tidak berkaitan dengan pertanian, maka pembangunan pada sektor pertanian menjadi terabaikan sehingga akan berpengaruh negatif pada pendapatan sektor pertanian.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Tenaga kerja sektor pertanian signifikan dipengaruhi positif oleh angkatan kerja, upah sektor pertanian dan pengeluaran pembangunan sektor pertanian. Angkatan kerja merupakan jumlah penduduk usia kerja baik yang sedang bekerja maupun yang tidak bekerja, angkatan kerja yang meningkat diikuti oleh penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian juga semakin besar karena pertanian berfungsi sebagai employment of last resort (Ikhsan, 2001).

Pada sektor pertanian dimana tenaga kerja keluarga ikut dominan terlibat dalam proses produksi, maka jumlah penggunaan tenaga kerja yang terlibat mempunyai hubungan positif dengan tingkat upah. Upah merupakan insentif bagi tenaga kerja sehingga semakin besar tingkat upah maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlibat pada sektor tersebut. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Pakasi (2005)

bahwa upah pada sektor pertanian berhubungan positif dengan tenaga kerja pada sektor pertanian.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Pupuk

Jumlah penggunaan pupuk dipengaruhi positif oleh areal tanaman padi, harga gabah dan lag pemakaian pupuk, sedang harga pupuk berpengaruh negatif terhadap jumlah penggunaan pupuk. Harga pupuk berhubungan negatif dengan penggunaan pupuk, apabila harga pupuk naik sementara pendapatan petani konstan maka daya beli petani akan turun dan pemakaian pupuk akan cenderung turun.

Harga gabah merupakan insentif bagi petani, karena apabila harga gabah naik dengan faktor lain konstan maka pendapatan petani naik sehingga petani terinsentif untuk memproduksi gabah lebih banyak. Dengan kenaikan pendapatan maka daya beli petani akan meningkat sehingga petani akan mampu membeli input pupuk yang lebih banyak untuk produksi gabah karena pupuk merupakan input yang dominan.

Areal tanaman padi mencerminkan kondisi skala usaha pada usahatani padi sehingga mempunyai hubungan positif dengan penggunaan pupuk, dimana areal tanaman padi yang lebih luas juga memerlukan penggunaan pupuk yang lebih banyak. Nilai elastisitas sebesar 0,9877 menunjukkan apabila areal tanaman padi meningkat 10 persen maka penggunaan pupuk akan meningkat sebesar 9,88 persen. Hal ini mencerminkan kondisi yang relatif konstan pada penggunaan pupuk per satuan areal tanaman padi, dimana apabila areal tanaman padi berubah pada satuan luas tertentu maka akan diikuti oleh penggunaan pupuk dengan satuan jumlah yang proporsional.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Gabah

Harga gabah dipengaruhi positif oleh harga pupuk, upah sektor pertanian, harga beras, dan lag harga gabah. Harga gabah tidak mengikuti mekanisme pasar sehingga tidak dipengaruhi oleh produksi gabah, tetapi pemerintah cenderung mengintervensi dengan penerapan harga dasar gabah (HDG) selanjutnya menjadi harga pembelian pemerintah (HPP).

Harga pupuk dan upah tenaga kerja sektor pertanian mempengaruhi harga gabah, apabila harga pupuk dan

upah di sektor pertanian yang merupakan harga faktor produksi meningkat maka gabah yang merupakan outputnya akan mengikuti. Harga gabah dipengaruhi oleh harga beras berhubungan positif, apabila harga beras di pasar tinggi maka harga gabah akan mengikuti begitu sebaliknya. Nilai elastisitas sebesar 0,9777 artinya apabila harga beras naik sebesar 10 persen maka harga gabah akan naik sebesar 9,78 persen, merupakan perubahan proporsional.

Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Harga Beras

Harga beras berhubungan negatif dengan produksi beras artinya apabila produksi beras meningkat maka harga beras akan turun, hal ini sesuai dengan fenomena ekonomi apabila produksi meningkat maka ketersediaan di pasar akan berlebih sehingga harga akan cenderung turun. Tetapi secara statistik tidak signifikan hal ini karena harga beras tidak sepenuhnya dilepas pada mekanisme pasar tetapi pemerintah selalu melakukan intervensi untuk menjaga kestabilan harga beras dengan melakukan operasi pasar murni (OPM) apabila harga beras cenderung naik pada batas aman serta melakukan stok dan pembelian pada saat panen raya dan harga jatuh. Pengeluaran rutin signifikan berpengaruh positif terhadap harga beras, komponen dari pengeluaran rutin salah satunya adalah gaji pegawai. Kenaikan gaji pegawai biasanya diikuti oleh kenaikan harga barang terutama harga makanan pokok salah satu diantaranya adalah beras. Cadangan beras nasional berhubungan negatif dengan harga beras, artinya apabila cadangan beras nasional menipis maka harga beras akan naik. Namun secara statistik tidak signifikan karena cadangan beras nasional relatif stabil.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Beras

Konsumsi beras dipengaruhi negatif oleh harga beras, jumlah penduduk miskin, dummy desentralisasi fiskal, dan dipengaruhi positif oleh pendapatan per kapita dan lag konsumsi beras. Harga beras signifikan berpengaruh negatif terhadap konsumsi beras dengan elastisitas -0,0222. Kecilnya elastisitas beras terhadap perubahan harga menunjukkan bahwa beras merupakan makanan pokok di Jawa Barat, perubahan harga hanya sedikit menurunkan konsumsi dan tidak merubah konsumen beras untuk merubah konsumsi dengan beralih pada barang substitusi dari beras.

Pendapatan per kapita berhubungan positif dengan konsumsi beras, menunjukkan beras masih merupakan barang normal sehingga apabila pendapatan naik maka konsumsi beras akan naik. Kondisi masyarakat di daerah penelitian rata-rata kenaikan pendapatannya masih digunakan untuk meningkatkan konsumsi makanan pokok beras sumber karbohidrat walau dalam proporsi kecil yang ditunjukkan dengan elastisitas sebesar 0,321.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Energi

Konsumsi energi dipengaruhi positif konsumsi beras, pendapatan per kapita, dana kesehatan, dan lag konsumsi energi. Konsumsi energi merupakan turunan dari konsumsi beras, apabila konsumsi beras meningkat maka konsumsi energi akan meningkat karena beras merupakan sumber utama karbohidrat. Elastisitas sebesar 0,8552 menunjukkan bahwa pola makan penduduk di daerah penelitian sebagian besar masih didominasi oleh beras sebagai makanan pokok penghasil energi, sehingga perubahan konsumsi beras dengan konsumsi energi searah dengan besaran hampir sama. Nilai elastisitas kurang dari satu menunjukkan selain beras masih ada makanan lain sebagai sumber energi di dalam makanan pokok penduduk.

Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Protein

Faktor yang signifikan mempengaruhi konsumsi protein adalah konsumsi energi, pendapatan per kapita, jumlah penduduk miskin, trend, dummy desentralisasi fiskal, dan lag konsumsi protein. Konsumsi energi berpengaruh positif menunjukkan makanan pokok penduduk di Jawa Barat mengandung komposisi kandungan energi dan protein yang relatif seimbang. Pendapatan per kapita berpengaruh positif, menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan digunakan untuk meningkatkan konsumsi protein karena protein merupakan makanan yang lebih bergizi. Jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap konsumsi protein, karena rata-rata konsumsi protein penduduk miskin masih dibawah standar kecukupan gizi (AKG) sehingga peningkatan jumlah penduduk miskin akan menurunkan rata-rata konsumsi protein.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin dipengaruhi signifikan oleh pengeluaran kesehatan per penduduk miskin, pendapatan per kapita, jumlah penduduk dan lag jumlah penduduk miskin dan pengeluaran pembangunan tidak berpengaruh signifikan pada jumlah penduduk miskin.

Pengeluaran kesehatan per penduduk miskin berhubungan negatif dengan nilai elastisitas sebesar -0,1078. Dana kesehatan bagi penduduk miskin sangat diperlukan, peningkatan kesehatan bagi masyarakat miskin merupakan peningkatan produktivitasnya yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bigsten (1992) dan ILO (1976) pendekatan yang cocok untuk pengurangan kemiskinan adalah dengan strategi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan), yang sarannya adalah peningkatan taraf hidup masyarakat miskin karena apabila kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi maka akan meningkatkan produktivitas dan pendapatannya.

Pendapatan per kapita berhubungan negatif dengan elastisitas sebesar -0,0192, peningkatan pendapatan per kapita yang diikuti oleh pemerataan pendapatan akan cenderung menurunkan jumlah penduduk miskin, karena masyarakat yang paling bawah tingkat pendapatannya juga akan ikut terangkat bersamaan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Tetapi peningkatan pendapatan per kapita yang tidak diikuti oleh pemerataan, dimana penyumbang terbesar dari pendapatan itu hanya beberapa golongan masyarakat mampu justru akan meningkatkan terjadinya kemiskinan. Nilai elastisitas dari pendapatan per kapita yang inelastis menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak sepenuhnya dinikmati oleh golongan masyarakat miskin, tetapi yang menikmati justru dari golongan masyarakat mampu sehingga peningkatan pendapatan hanya kecil sekali bisa mengurangi angka kemiskinan.

Pengeluaran pembangunan berhubungan negatif dengan jumlah penduduk miskin, diharapkan meningkatnya pengeluaran pembangunan akan semakin banyak dana yang tersedia yang bisa digunakan untuk program pengurangan kemiskinan. Namun kenyataannya pengeluaran pembangunan tidak signifikan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dijalankan di daerah penelitian masih kurang berpihak pada masyarakat miskin.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Anak Gizi Buruk

Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap angka anak gizi buruk adalah konsumsi protein, pendapatan per kapita, dummy desentralisasi fiskal dan lag angka gizi buruk. Sedang jumlah puskesmas tidak signifikan terhadap angka anak gizi buruk. Konsumsi protein berhubungan negatif dengan elastisitas sebesar -2,6763, karena protein merupakan sumber gizi yang baik untuk pertumbuhan, apabila konsumsi protein terpenuhi maka kebutuhan gizi akan terpenuhi.

Jumlah puskesmas berhubungan negatif dengan angka anak gizi buruk tetapi tidak berpengaruh signifikan, artinya apabila jumlah puskesmas meningkat diharapkan angka anak gizi buruk akan turun. Namun secara fisik saja jumlah puskesmas tidak signifikan dan agar jumlah puskesmas berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka anak gizi buruk seharusnya setiap puskesmas memberi pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat miskin dan bersikap proaktif terhadap program-program yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat miskin. Kondisi yang ada sekarang pelayanan kesehatan di puskesmas terhadap masyarakat miskin masih kurang, sehingga keberadaan puskesmas tidak signifikan terhadap penurunan angka anak gizi buruk.

Dummy desentralisasi fiskal bernilai positif menunjukkan bahwa pada masa desentralisasi fiskal angka anak gizi buruk relatif lebih besar. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal penanganan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin relatif terabaikan karena terjadinya perubahan manajemen dan kelembagaan akibat desentralisasi fiskal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Kematian Bayi

Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap angka kematian bayi adalah angka gizi buruk, jumlah penduduk miskin, jumlah bidan, pengeluaran kesehatan dan pendidikan dan dummy desentralisasi fiskal. Jumlah penduduk miskin berhubungan positif dengan angka kematian bayi, karena penduduk

miskin adalah penduduk yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Sehingga peluang terjadinya kematian dalam proses kelahiran lebih besar, karena kemungkinan status gizi yang tidak mendukung, pengetahuan tentang kesehatan kurang juga kondisi kesehatan tidak terpenuhi.

Dana pengeluaran kesehatan dan pendidikan berhubungan negatif dengan angka kematian bayi, karena semakin besar dana kesehatan dan pendidikan maka semakin besar fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan sehingga masyarakat akan semakin sadar akan kesehatan yang akhirnya akan berpengaruh pada angka kematian bayi. Dummy desentralisasi fiskal bernilai negatif menunjukkan masa desentralisasi fiskal angka kematian bayi relatif lebih kecil.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Umur Harapan Hidup

Faktor-faktor yang signifikan berpengaruh pada umur harapan hidup adalah konsumsi protein, pengeluaran kesehatan per penduduk miskin, angka kematian bayi dan lag umur harapan hidup. Konsumsi protein berhubungan positif, protein merupakan zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak sehingga apabila tingkat konsumsi protein berkecukupan akan mempengaruhi kondisi kesehatan konsumen dan kondisi ini akan berpengaruh pada kondisi umur harapan hidup seseorang. Pengeluaran kesehatan per penduduk miskin berhubungan positif dengan umur harapan hidup, pengeluaran kesehatan yang langsung ditujukan oleh penduduk miskin akan langsung bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan akan berpengaruh pada umur harapan hidup. Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator status gizi dari golongan masyarakat rawan gizi, apabila kondisi ini semakin baik maka akan mempengaruhi kondisi dan kualitas SDM sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi kondisi umur harapan hidup. Dummy desentralisasi fiskal bernilai positif menunjukkan bahwa kondisi umur harapan hidup relatif lebih tinggi pada masa desentralisasi fiskal.

SIMULASI DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP KINERJA FISKAL, PEREKONOMIAN DAERAH, KETAHANAN PANGAN DAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT

Hasil validasi berdasarkan kriteria statistik memberikan nilai Bias (UM), Reg (UR) dan Var (US) yang secara keseluruhan mendekati nol, serta nilai U-Theil secara keseluruhan mendekati nol yang mengindikasikan bahwa simulasi model secara umum baik karena mendekati data aktualnya (Pyndyck and Rubinfeld, 1977). Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan menurunkan kemiskinan dilakukan alternatif-alternatif kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi desentralisasi fiskal di Jawa Barat. Pada Tabel 2 disajikan dampak alternatif kebijakan : S1 (peningkatan pengeluaran sektor pertanian 20 persen), S2 (peningkatan harga pupuk 15 persen), S3 (peningkatan harga gabah 15 persen), S4 (peningkatan upah sektor pertanian 15 persen), S5 (kombinasi S2 dan S3) terhadap kinerja fiskal, perekonomian daerah, ketahanan pangan dan kemiskinan di Jawa Barat.

Dalam keterbatasan anggaran pemerintah, peningkatan pengeluaran sektor pertanian (S1) masih diperlukan mengingat selama ini pengeluaran sektor pertanian masih relatif kecil (dibawah dua persen dari pengeluaran daerah) padahal sektor ini menampung tenaga kerja cukup besar di perdesaan dan sektor ini juga punya keterkaitan ke depan dan ke belakang yang relatif besar dengan sektor lain. Sebagaimana tersaji pada Tabel 2, peningkatan pengeluaran sektor pertanian berdampak pada peningkatan PDRB sektor pertanian, PDRB non pertanian dan PDRB selanjutnya meningkatkan pendapatan per kapita. Peningkatan pengeluaran sektor pertanian juga meningkatkan produksi gabah dan pendapatan sektor pertanian, yang diikuti oleh menurunnya harga gabah dan beras, meningkatkan konsumsi beras, energi dan protein, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, angka gizi buruk dan angka kematian bayi serta meningkatkan umur harapan hidup. Kemudian meningkatkan kinerja fiskal melalui penurunan kesenjangan fiskal, karena penurunan jumlah penduduk miskin berarti mengurangi beban subsidi pemerintah bagi masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak sehingga meningkatkan pendapatan daerah. Jadi secara umum peningkatan pengeluaran sektor pertanian berdampak pada peningkatan kinerja

perekonomian daerah, peningkatan kinerja ketahanan pangan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kinerja fiskal daerah.

Simulasi peningkatan harga pupuk (S2) dilakukan dalam upaya untuk mengurangi/ menghapuskan subsidi pupuk, keterbatasan anggaran pembangunan mengharuskan pemerintah untuk lebih selektif dalam melakukan subsidi. Sebagaimana tersaji pada Tabel 2, pengurangan subsidi pupuk yang dalam simulasi ini diproksi dengan kenaikan harga pupuk, berdampak pada penurunan penggunaan pupuk, penurunan produksi gabah dan penurunan PDRB sektor pertanian. Sehingga menurunkan pendapatan sektor pertanian, pendapatan per kapita, konsumsi beras, energi dan protein. Meningkatkan jumlah penduduk miskin, angka gizi buruk, angka kematian bayi dan menurunkan umur harapan hidup. Peningkatan jumlah penduduk miskin dan penurunan ketahanan pangan menurunkan penerimaan pemerintah dari

pajak sehingga menurunkan PAD dan meningkatkan kesenjangan fiskal daerah. Peningkatan harga pupuk mempunyai dampak yang besar pada penurunan produksi gabah dan pendapatan petani, sehingga menurunkan jumlah kemiskinan dan kinerja ketahanan pangan yang akhirnya berdampak pada penurunan kinerja fiskal. Hasil simulasi ini memberi implikasi bahwa harga pupuk perlu mendapat pengamanan dari pemerintah dan sampai saat ini subsidi pupuk masih diperlukan karena pupuk merupakan input dominan. Untuk itu pemerintah daerah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk ikut mengawasi peredaran pupuk agar pupuk bersubsidi dapat sampai ke tangan petani dengan efisien dan tepat waktu.

Kebijakan peningkatan harga gabah (S3) merupakan alternatif yang bisa ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya memberi insentif petani padi dalam rangka mengamankan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP). Peningkatan harga gabah merupakan salah

Tabel 2. Dampak Alternatif Kebijakan Terhadap Kinerja Fiskal, Perekonomian Daerah, Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Jawa Barat pada Masa Desentralisasi Fiskal (2001-2005)

Peubah Endogen	Nilai Dasar	S1 (persen)	S2 (persen)	S3 (persen)	S4 (persen)	S5 (persen)
Penerimaan Daerah (Milyar Rp)	475152	0,0011	-0,0004	0,0020	0,0011	-0,0003
PAD (Milyar Rp)	27839	0,0144	-0,0072	0,0052	0,0180	-0,0035
Pajak Daerah (Milyar Rp)	12060	0,0332	-0,0166	0,0102	0,0332	-0,0018
Dana Alokasi (Milyar Rp)	282803	-0,0003	0,0001	-0,0004	-0,0001	0,0005
Pengeluaran Rutin (Milyar Rp)	322286	0,0020	0,0009	0,0013	0,0036	0,0017
Pengeluaran Pembngn (Milyar Rp)	117005	0,0013	0,0002	0,0009	0,0006	0,0009
Peng.Sek. Pertanian (Milyar Rp)	4142	20,0000	0,0001	0,0004	0,0001	0,0003
Pengeluaran Daerah (Milyar Rp)	439291	0,0002	-0,0003	0,0010	0,0008	0,0002
Kesenjangan Fiskal (Milyar Rp)	35861	-3,0053	0,0056	-0,0005	-0,0112	0,0019
PDRB Pertanian (Milyar Rp)	592,2146	2,8420	-1,2511	0,3026	4,4519	-0,7928
PDRB Non Pertanian (Trilyun Rp)	2414	0,0006	-0,0001	0,0005	0,0003	-0,0003
PDRB (Trilyun Rp)	3007	0,5321	-0,2661	0,0333	0,8647	-0,1360
Produksi Gabah (Ton)	648847	0,9825	-13,1963	3,1923	2,4843	-8,3372
Pendapatan Pertanian (Ribu Rp)	362,2849	0,2675	-3,5925	0,8690	2,7163	-2,0967
Tenaga Kerja Pertanian (Ribu Org)	292,6429	0,3460	-0,0636	0,2012	5,0705	-0,0350
Penggunaan Pupuk (Ton)	4031705	-0,0032	-26,0132	6,2927	0,5707	-11,9625
Harga Gabah (Rp/Kg)	1552	-0,0644	0,2577	15,0000	2,8351	15,0000
Produksi Beras (Ton)	421751	0,9823	-13,1964	3,1922	2,4842	-8,3371
Pendapatan Per Kapita (JutaRp/Th)	1,959	0,4033	-0,2654	0,0715	0,9495	-0,1556
Harga Beras (Rp /Kg)	3085	-0,0324	0,2593	-0,0648	-0,0648	0,2039
Konsumsi Beras (Kg/ Kap/ Bln)	12,9312	0,0095	-0,0077	0,0023	0,0015	-0,0040
Konsumsi Energi (Kkal / Kap/Hr)	2149	0,0005	-0,0005	0,0004	0,0015	0,0006
Konsumsi Protein (Gr/ Kap/Hr)	56,6952	0,0009	-0,0053	0,0012	0,0011	-0,0038
Jumlah Orang Miskin (Orang)	250,6949	-0,0144	0,0003	-0,0006	-0,0008	0,0002
Angka Anak Gizi Buruk (persen)	17,7094	-0,0028	0,0169	-0,0045	-0,0034	0,0083
Angka Kematian Bayi (Jw/1000Klhrn)	54,7641	-0,0018	0,0022	-0,0005	-0,0006	0,0012
Umur Harapan Hidup (Tahun)	65,132	0,0003	-0,0009	0,0002	0,0002	-0,0005

satu kompensasi dari pengurangan/ penghapusan subsidi input bagi petani. Peningkatan harga gabah berdampak pada peningkatan PDRB pertanian, PDRB non pertanian, PDRB dan pendapatan per kapita. Selain itu juga meningkatkan penggunaan pupuk, produksi gabah, pendapatan sektor pertanian, konsumsi beras, energi dan protein, serta menurunkan jumlah kemiskinan, angka gizi buruk, angka kematian bayi dan meningkatkan umur harapan hidup. Dampak paling besar dari peningkatan harga gabah adalah peningkatan produksi gabah yang didahului oleh peningkatan penggunaan pupuk. Peningkatan harga gabah bisa dilakukan pemda melalui pembangunan fasilitas pasca panen dan pergudangan di daerah sentra produksi, bekerjasama dengan pemerintah pusat mengaktifkan berlakunya kebijakan HPP gabah petani dan bisa menetapkan kebijakan harga gabah daerah yang lebih tinggi dibanding HPP yang ditetapkan pemerintah, memperbaiki sarana transportasi dan distribusi pemasaran sehingga tercipta sistem pemasaran gabah yang adil, kompetitif dan efisien di perdesaan.

Peningkatan upah sektor pertanian (S4) masih diperlukan karena tingkat upah dan pendapatan pada sektor pertanian masih relatif kecil dibanding sektor lain sehingga diharapkan bisa sebagai daya tarik terutama bagi tenaga kerja trampil dan berpendidikan. Sebagaimana tersaji pada Tabel 2 kebijakan ini berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, produksi gabah, pendapatan sektor pertanian, PDRB sektor pertanian, pendapatan per kapita, konsumsi beras, energi dan protein, serta menurunkan jumlah penduduk miskin, angka gizi buruk, angka kematian bayi dan meningkatkan umur harapan hidup yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja fiskal. Dampak paling besar pada peningkatan tenaga kerja dan pendapatan pertanian. Peningkatan upah bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas petani melalui peningkatan pendidikan dan ketrampilan serta memberi fasilitas terciptanya diversifikasi usaha dan pendapatan pada petani pangan baik on farm maupun off farm.

Kombinasi peningkatan harga gabah dan harga pupuk (S5) dengan proporsi yang sama memberi dampak pada penurunan penggunaan pupuk sehingga menurunkan produksi gabah dan PDRB Pertanian. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan sektor pertanian dan pendapatan per

kapita, menurunkan konsumsi beras, energi dan protein serta meningkatkan angka gizi buruk, angka kematian bayi dan menurunkan umur harapan hidup. Dampak negatif dari peningkatan harga pupuk lebih dominan dibanding dampak positif dari peningkatan harga gabah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harga input pengaruhnya lebih efektif dibanding kebijakan harga output terhadap produksi dan pendapatan bagi petani pangan khususnya padi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh pada peningkatan penerimaan maupun pengeluaran fiskal daerah, namun peningkatan fiskal yang ada lebih didominasi oleh peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat khususnya dana alokasi dimana masa sebelum desentralisasi fiskal share dana alokasi sebesar 58 persen dan meningkat menjadi 68 persen pada masa desentralisasi. PAD yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah pada masa desentralisasi justru mengalami penurunan dari 20 persen menjadi 10 persen pada masa desentralisasi fiskal. Pengeluaran fiskal daerah pada masa desentralisasi fiskal lebih dominan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin yaitu dari 65 persen naik menjadi 77 persen pada masa desentralisasi fiskal, sehingga dana untuk membiayai pengeluaran pembangunan menjadi semakin terbatas pada masa desentralisasi fiskal.

Peningkatan pengeluaran sektor pertanian berdampak paling besar pada peningkatan PDRB sektor pertanian yang selanjutnya meningkatkan kinerja ketahanan pangan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kinerja fiskal daerah. Peningkatan harga pupuk berdampak paling besar pada penurunan penggunaan pupuk dan produksi gabah yang selanjutnya mempengaruhi kinerja ketahanan pangan, peningkatan kemiskinan dan penurunan kinerja fiskal. Peningkatan harga gabah berdampak paling besar pada peningkatan produksi gabah yang selanjutnya akan meningkatkan ketahanan pangan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kinerja fiskal. Peningkatan upah sektor pertanian berdampak paling besar pada penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, PDRB sektor pertanian, pendapatan sektor pertanian, produksi gabah dan selanjutnya meningkatkan ketahanan pangan, menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kinerja fiskal.

Peningkatan upah sektor pertanian memberi respons yang paling baik pada peningkatan pendapatan pertanian, ketahanan pangan dan penurunan kemiskinan. Untuk itu pemerintah daerah perlu mengapresiasi dengan memberi fasilitasi masyarakat pada berkembangnya penciptaan deversifikasi income dan deversifikasi usaha pada petani pangan baik pada lingkup on farm, off farm maupun non farm. Serta diikuti peningkatan kualitas SDM petani melalui pendidikan dan pelatihan yang terprogram secara terpadu.

Peningkatkan harga pupuk walaupun diikuti oleh peningkatan harga gabah yang proporsional berdampak pada penurunan pendapatan petani dan kinerja ketahanan pangan, serta meningkatkan kemiskinan. Untuk itu dalam menetapkan besaran kenaikan harga gabah pada kebijakan HPP perlu memperhitungkan besaran kenaikan harga pupuk agar bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan subsidi pupuk sampai saat ini masih diperlukan bagi petani, untuk itu diharapkan pemda bisa ikut mengamankan sehingga pupuk bisa sampai ke petani tepat waktu dengan harga terjangkau.

REFERENSI

- Bigsten, A. 1992. Kemiskinan, Ketimpangan dan Pembangunan. Ilmu Ekonomi Pembangunan. LPUI, Jakarta.
- Herliana, L. 2004. Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian Indonesia : Analisis Dekomposisi SNSE, Thesis Magister Sains, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Ikhsan, M. 2001. Reformasi Kebijakan Ekonomi Beras Nasional. Tim Pengkajian Kebijakan Perberasan Nasional, Jakarta.
- ILO. 1976. Employment, Growth and Basic Needs. ILO, Jeneva.
- Kerk, L.P. and Garry, W. 1997. Does Fiscal Decentralization Lead to Economics Growth? Brigham Young University Provo. www.worldbank.org/decentralization.
- Lin, J.Y and Z, Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economics Growth in China. Economics Development and Cultural Change 49 (1) : 1 – 22.
- Pakasi, C.B.D.2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Pogue, T.F and L.G. Sqontz. 1978. Government and Economics Choice. An Introduction to Public Finance. Hiughton MillCompany, USA.
- Pyndyck, R.S. and D.L. Rubienfeld. 1991. Econometric Model and Economic Forecast. Mcgraw-Hill International Edition, Singapore.
- Rao, M.G. 2000. Poverty Allevation under Decentralization. www.worldbank.org/decentralization.
- Roy, B. 1999. Worldwide Trends in Fiscal Decentralization. www.worldbank.org/decentralization.
- Smoke, P. 2001. Fiscal Decentralization in Developing Countries : A Review of Current Concepts and Practice. United Nations Research Institute for Social Development. www.worldbank.org/decentralization.
- Sondakh, L. W. 1999. Mencari Platform Otonomi Daerah dalam Krisis Ekonomi. Makalah dalam Seminar Nasional Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Pemberdayaan Potensi. Jakarta.
- Stiglitz, J.E. 2000. Economics of The Public Sector. W.W. Norton and Company, New York.
- Yudhoyono, S.B. 2004. Pembangunan Pertanian dan Perdesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran : Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Fiskal. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Lampiran 1. Rangkuman Hasil Parameter Dugaan Model, Taraf Nyata dan Elastisitas

1. Persamaan Pajak Daerah

Variable	Parameter	T for H0:	Prob > T	Elastisitas		Label Variabel
	Estimate	Parameter=0		J. Pendek	J. Panjang	
INTERCEP	-551.819796	-0.269	0.788	-	-	INTERCEP
PDRB	0.187383	1.237	0.2181	0.0747	0.1717	PDRB
JMLTMIS	13.205164	6.036	0.0001	2.2525	11.2077	Jumlah penduduk tidak miskin
JMLMIS	-48.345719	-6.098	0.0001	-1.6868	-8.393	Jumlah penduduk miskin
D MDF	6267.430335	4.538	0.0001	-	-	Dummy desentralisasi
LPJKDAE	0.799019	6.277	0.0001	-	-	Lag pajak daerah

2. Persamaan Dana Alokasi

INTERCEP	-4374.654926	-0.232	0.8183	-	-	INTERCEP
JMLPDK	50.306315	3.276	0.0013	0.4263	0.9159	Jumlah penduduk
LUDAE	11.243174	1.295	0.1975	0.1212	0.2604	Luas daerah
JMLMIS	28.696834	2.257	0.0038	0.1824	0.3919	Jumlah penduduk miskin
PAD	-4.567846	-1.013	0.2564	-	-	Penerimaan asli daerah
D MDF	234633	13.546	0.0001	-	-	Dummy desentralisasi fiscal
LDALOK	0.534633	18.434	0.0001	-	-	Lag dana alokasi

3. Persamaan Pengeluaran Rutin

INTERCEP	53437	6.889	0.0001	-	-	INTERCEP
MJPGBB	0.015572	2.065	0.0408	0.0555	0.5393	Multiple belanja pegawai & barang
PAD	265780	1.860	0.426	-	-	Pendapatan asli daerah
DALOK	564328	3.835	0.062	0.1652	1.6055	Dana alokasi
D MDF	252609	18.484	0.0001	-	-	Dummy desentralisasi fiscal
LPRUTIN	0.897104	9.362	0.0001	-	-	Lag pengeluaran rutin

4. Persamaan Pengeluaran Sektor Pertanian

INTERCEP	369.026425	0.666	0.5066	-	-	INTERCEP
AREAL	0.010038	2.556	0.0116	0.4632	1.0617	Luas areal tanaman padi
PAD	3.6534 24	3.128	0.0026	0.0634	0.1453	Penerimaan asli daerah
DALOK	0.003198	1.346	0.1806	0.3248	0.7445	Dana alokasi
D MDF	2640.285718	7.642	0.0001	-	-	Dummy desentralisasi fiscal
LPSEKP	0.563788	6.598	0.0001	-	-	Lag pengeluaran sektor pertanian

5. Persamaan PDRB Sektor Pertanian

INTERCEP	-90.156349	-3.11	0.0023	-	-	INTERCEP
TKP	1.399257	15.461	0.0001	0.7078	1.5585	Jumlah tenaga kerja pertanian
PSEKP	0.014812	4.452	0.0001	0.0773	0.1702	Pengeluaran sektor pertanian
INCP	0.569273	5.58	0.0001	0.3781	0.8325	Pendapatan per kapita petani
AREAL	3.145720	1.0134	0.3976	-	-	Areal tanaman padi
LPDRBP	0.545846	6.324	0.0001	0.0039	-	Lag PDRB sektor pertanian

6. Persamaan PDRB Non Pertanian

Variable	Parameter	T for H0:	Prob > T	Elastisitas		Label Variabel
	Estimate	Parameter=0		J. Pendek	J. Panjang	
INTERCEP	-1918.283489	-13.09	0.0001	-	-	Intercep
TKNP	5.158899	13.32	0.0001	0.7758	1.4789	Jumlah tenaga kerja non pertanian
PSEKLN	0.003415	3.697	0.0003	0.1043	0.1988	Pengeluaran sektor lainnya
INCNP	338.119562	74.18	0.0001	0.9185	1.7509	Pendapatan / kapita non pertanian
PDRBP	0.436852	1.02	0.4002	-	-	PDRB sector pertanian
LPDRBNP	4754332	5.25	0.0008	-	-	Lag PDRB non pertanian

7. Persamaan Poduksi Gabah

INTERCEP	-191906	-3.05	0.0027	-	-	Intercep
PGAP	0.561906	2.35	0.0056	0.1540	0.2771	Harga gabah
QPUK	0.081642	10.37	0.0001	0.6970	0.9254	Jumlah pupuk
TKP	959.734694	7.88	0.0001	0.4417	0.7948	Jumlah tenaga kerja pertanian
PSEKP	5.810158	0.751	0.4537	-	-	Pengeluaran sektor pertanian
D MDF	256025	5.578	0.0001	-	-	Dummy desentralisasi
LPROD GAB	0.444217	2.686	0.0081	-	-	Lag produksi gabah

8. Persamaan Pendapatan Per Kapita Petani

INTERCEP	159.154332	7.899	0.0001	-	-	INTERCEP
PROD GAB	0.000152	4.594	0.0001	0.2515	0.2859	Produksi gabah
PSEKL	-0.000459	-4.035	0.0001	-0.074	-0.0841	Pengeluaran non pertanian
TKP	0.498065	8.129	0.0001	0.3793	0.4312	Jumlah tenaga kerja pertanian
LIN CPP	0.12029	0.457	0.6533	-	-	Lag pendapatan /kapita petani

9. Persamaan Tenaga Kerja Pertanian

INTERCEP	-10.291493	-0.196	0.8445	-	-	INTERCEP
AK	0.00033	8.752	0.0001	0.8211	1.2936	Jumlah angkatan kerja
WTKP	0.004909	1.267	0.2073	0.1939	0.3054	Upah tenaga kerja pertanian
AREAL	0.000050371	0.273	0.7873	-	-	Luas areal tanaman padi
PSEKP	1.240132	1.620	0.1245	0.1026	0.1616	Pengeluaran sector pertanian
D MDF	216521	1.485	0.1941	-	-	Dummy desentralisasi fiscal
LTKP	0.36521	2.485	0.0141	-	-	Lag jumlah tenaga kerja pertanian

10. Persamaan Penggunaan Pupuk

INTERCEP	2547265	5.253	0.0001	-	-	INTERCEP
AREAL	38.482878	12.554	0.0001	0.9877	1.0931	Luas areal pangan
PPUK	-2665.41062	-5.819	0.0001	-0.6015	-0.7266	Harga pupuk
PGAB	516.228199	1.064	0.2893	0.1246	0.1505	Harga gabah
D MDF	216521	1.205	0.2046	-	-	Dummy desentralisasi fiscal
LQPUK	0.17217	1.382	0.1692	-	-	Lag jumlah pupuk

11. Persamaan Harga Gabah

Variable	Parameter	T for H0:	Prob > T	Elastisitas		Label Variabel
	Estimate	Parameter=0		J. Pendek	J. Panjang	
INTERCEP	-137.84452	-10.668	0.0001	-	-	INTERCEP
PPUK	0.87685	6.768	0.0067	0.4562	0.4715	Harga pupuk
WTKP	0.015005	11.729	0.0001	0.1324	0.1368	Upah tenaga kerja pertanian
PBR5	0.489051	196.943	0.0001	0.9777	1.0106	Harga beras
PSEKP	0.000055	0.052	0.9588	-	-	Pengeluaran sektor pertanian
D MDF	0.162344	2.004	0.0160	-	-	Dummy desentralisasi fiskal
LPGAP	0.032548	3.758	0.0003	-	-	Lag harga gabah

12. Persamaan Harga Beras

INTERCEP	1212.870707	5.90812	0.0001	-	-	INTERCEP
PRODBRS	-0.000154	-0.3923	0.6974	-	-	Produksi beras
PRUTIN	0.006145	13.2214	0.0001	0.4637	2.9131	Pengeluaran rutin
CADBRS	-4567.987621	-1.229	0.3260	-	-	Cadangan beras nasional
D MDF	0.223443	2.123	0.0065	-	-	Dummy desentralisasi
LPBRS	0.840819	6.881	0.0001	-	-	Lag harga beras

13. Persamaan Konsumsi Beras

INTERCEP	14.071878	97.89	0.0001	-	-	INTERCEP
PBR5	-0.000119	-2.726	0.0073	-0.0222	-0.0337	Harga beras
JMLMIS	-0.002361	-6.506	0.0001	-0.0464	-0.0704	Jumlah penduduk miskin
IKAP	0.000021853	1.515	0.1321	0.0032	0.0048	Pendapatan per kapita
D MDF	-0.232747	-0.834	0.2805	-	-	Dummy desentralisasi
LCONBRS	0.34167	2.835	0.0053	-	-	Lag konsumsi beras

14. Persamaan Konsumsi Energi

INTERCEP	312.989317	3.958	0.0001	-	-	INTERCEP
CONBRS	141.703236	23.8224	0.0001	0.8552	0.956	Konsumsi beras
IKAP	0.257806	2.5156	0.0321	0.1535	0.1716	Pendapatan per kapita
DPKES	0.00066	0.7235	0.4708	-	-	Pengeluaran kesehatan
D MDF	-3.23653	-2.9582	0.002	-	-	Dummy desentralisasi fiskal
LCONSENI	0.105435	1.969	0.051	-	-	Lag konsumsi energi

15. Persamaan Konsumsi Protein

INTERCEP	-1414.334811	-9.7621	0.0001	-	-	INTERCEP
CONSENI	0.020636	12.632	0.0001	0.7827	1.5843	Lag konsumsi energi
IKAP	5.257806	2.0156	8321	0.3502	0.7088	Pendapatan per kapita
JMLMIS	-2.005260	-3.2506	0.0001	-0.0258	-0.0522	Jumlah penduduk miskin
TREND	0.714154	9.934	0.0001	-	-	Trend
D MDF	-1.161020	-4.657	0.0001	-	-	Dummy desentralisasi
LCONPROT	0.5059780	5.255	0.0001	-	-	Lag konsumsi protein

16. Persamaan Jumlah Penduduk Miskin

Variable	Parameter	T for H0:	Prob > T	Elastisitas		Label Variabel
	Estimate	Parameter=0		J. Pendek	J. Panjang	
INTERCEP	31.383654	1.405	0.1622	-	-	INTERCEP
DPKSMIS	-1.813909	-3.225	0.0016	-0.1078	-0.1908	Pengeluaran kesehatan/pend miskin
IKAP	-0.002598	-1.195	0.2341	-0.0192	-0.0341	Pendapatan per kapita
PEMB	-0.000032	-0.209	0.8346	-	-	Pengeluaran pembangunan
JMLPDK	0.171142	11.952	0.0001	1.0078	1.7831	Jumlah penduduk
D MDF	-1.161020	-1.021	0.3205	-	-	Dummy desentralisasi
LJMLMIS	0.434785	5.172	0.0001	-	-	Lag jumlah penduduk miskin

17. Persamaan Angka Gizi Buruk

INTERCEP	3525.48931	9.2551	0.0001	-	-	INTERCEP
CONPROT	-1.006225	-2.938	0.0039	-2.6763	-4.3728	Konsumsi protein
JMLPSM	-0.010427	-0.652	0.5155	-	-	Jumlah puskesmas
IKAP	-3.025467	-4.2552	0.0001	-0.0247	-0.0404	Pendapatan per kapita
JMLSKLH	-2.408931	-0.8213	0.4351	-	-	Jumlah sekolah
JMLBHRP	0.423356	1.0.255	0.3621	-	-	Jumlah penduduk buta huruf
D MDF	1.7222	9.165	0.0001	-	-	Dummy desentralisasi
LAGZBRK	0.387974	3.448	0.0007	-	-	Lag anak gizi buruk

18. Persamaan Angka Kematian Bayi

INTERCEP	48.399147	15.622	0.0001	-	-	INTERCEP
AGZBRK	0.395665	4.695	0.0001	0.1471	0.2423	Angka anak gizi buruk
JMLMIS	0.021822	3.886	0.0002	0.097	0.1598	Jumlah penduduk miskin
JMLBDN	-0.010886	-1.638	0.1038	-0.057	-0.0093	Jumlah bidan
MDKSPN	-2.10E-09	-1.837	0.0684	-0.004	-0.0066	Multiple pengeluaran kes & pendidikan
D MDF	-2.399693	-1.777	0.0779	-	-	Dummy desentralisasi
LAKMTBY	0.392946	3.8	0.0002	-	-	Lag angka kematian bayi

19. Persamaan Usia Harapan Hidup

INTERCEP	65.157453	15.87	0.0001	-	-	INTERCEP
CONPROT	0.1261	1.917	0.0573	0.1123	0.1316	Konsumsi protein
DPKSMIS	0.033875	3.53	0.0006	0.0081	0.0094	Pengeluaran kes/penduduk miskin
AKMBY	-0.150308	-7.609	0.0001	-0.1353	-0.1586	Angka kematian bayi
D MDF	0.207502	0.576	0.5656	-	-	Dummy desentralisasi
LUHHDP	0.354258	3.472	0.0007	0.0008	0.0009	Lag usia harapan hidup